

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adji, Indriyanto Seno, 2007, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan ke-2, CV. Diadit Media, Jakarta
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenadamedia, Jakarta
- Amiati, Mia, 2014, *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*, Miswar, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Black, Henry Campbell, 1978, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat
- Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum, Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah*, Solusi Publishing, Jakarta
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, Jakarta
- Effendi, Tolib, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan RI: Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan pertama, Badan Penerbit FHUI, Depok
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- H.R., Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed.1, Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta

- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Rev, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanni S., Vincentia., *et.al.*, 2009, *Jangan Bunuh KPK: Perlawanan terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. ke-1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Edisi Pertama, Erlangga, Jakarta
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian, Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta
- Kaligis, O.C., 2011, *Deponering, Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2011, *Korupsi Bibit-Chandra*, Cetakan Ke-Enam, Penerbit Indonesia Against Justice, Yarsif Watampone, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di Luar Pasal 77 - Pasal 83 KUHAP)*, Cetakan Pertama, Yarsif Watampone, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan IX, Nusa Media, Bandung
- Makaro, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marpaung, Leden, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta

- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Poernomo, Bambang 1993, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1990, *Komentar Atas KUHP*, Cet-3, Pradnya Paramita, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Ed.Pertama, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan IV, CV. Mandar Maju, Bandung
- Rawls, John, 1999, *Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts
- Roestandi, H.Achmad dan Muchjidin Effendie, 1993, *Komentar Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed.1, Cetakan kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soesilo, R., 1992, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor

- Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta
- Tanya, Bernard L., *et.al*, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Ed.Rev., Cet.IV, Genta Publishing, Yogyakarta
- Tjandra, W. Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta
- Utrecht, E., 1964, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451;
- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan sdr. Bibit Samad Rianto;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 TH 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor TAP-01/O.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah;

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor TAP-02/O.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto;

Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Jaksa Agung Nomor TAP-001/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah;

Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Jaksa Agung Nomor TAP-002/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto

#### **Internet:**

Agus Sahbani, "MK 'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan", <http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan>, diakses 28 Februari 2016

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Ombudsman: Penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri Maladministrasi",

*<http://www.nasional.kompas.com/read/2015/02/24/19354781/Ombudsman:-Penangkapan-Bambang-Widjojant-oleh-Polri-Maladministrasi>, diakses 11 Mei 2016*

Andi Sofyan, “Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana atau Terhukum Dalam Hukum Pidana”,  
*<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan.html#>*, diakses 26 Januari 2016

Artikel Majalah Tempo, Senin 01 November 2010, “Deponering Kasus Bibit-Chandra: Jalan Akhir ala Kejaksaan”,  
*<http://www.infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=7717&l=deponering-Kasus-Bibit-Chandra-Jalan-Akhir-ala-Kejaksaan>*, diakses 23 Agustus 2015

Bilal Ramadhan, “Bambang Widjojanto Ditangkap Sebagai Tersangka Kasus Kesaksian Palsu”,  
*<http://www.m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/23/nim3bs-Bambang-Widjojanto-Ditangkap-Sebagai-Tersangka-Kasus-Kesaksian-Palsu>*, diakses 11 Mei 2016

Damang, “Wewenang”,  
*<http://www.negarahukum.com/hukum/wewenang.html>*, diakses 23 Agustus 2015

Desi Angriani, “Deponering Kasus AS-BW Tinggal Diumumkan”,  
*<http://www.m.metrotvnews.com/read/2016/02/25/490168/deponering-kasus-AS-BW-tinggal-diumumkan>*, diakses 29 Februari 2016

Diah Restuning Maharani, “Teori Kewenangan”,  
*<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>*, diakses 23 Agustus 2015

Ech-wan, “Mari Dukung Bibit Dan Chandra Dari Netter Hingga Tokoh Nasional”,  
*<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/10/30/mari-dukung-bibit-dan-chandra-dari-netter-hingga-tokoh-nasional/>*, diakses 14 Februari 2016

\_\_\_\_\_, “Gerakan Cicak dan Kisah Cicak Melawan Buaya KPK vs Polri”,  
*<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/13/gerakan-cicak-dan-kisah-cicak-melawan-buaya-kpk-vs-polri/>*, diakses 14 Februari 2016

Eddy O.S. Hiariej, “Quo Vadis Kasus Bibit-Chandra”,  
*<http://www.nasional.kompas.com/read/2010/04/28/03154610/quotquo.vadisquot.kasus.bibit-chandra>*, diakses 26 Februari 2016

Eka Hakim, "Beda Keterangan Polda dan Kejati soal Berkas Kasus Abraham Samad",  
<http://www.m.liputan6.com/news/read/2248464/Beda-Keterangan-Polda-dan-Kejati-soal-Berkas-Kasus-Abraham-Samad>, diakses 10 Mei 2016

Erman Rajagukguk, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Individu Dan Penguasa Serta Kebijakan Penguasa yang Tidak Dapat Digugat,"  
<https://infopelangi.wordpress.com/2010/08/08/perbuatan-melawan-hukum-oleh-individu-dan-penguasa-serta-kebijaksanaan-penguasa-yang-tidak-dapat-digugat/>, diakses 18 Februari 2016

Farouk Arnaz, "Bambang 'Didik' Saksi Beri Keterangan Palsu di MK",  
<http://www.beritasatu.com/nasional/243018-Bambang-Didik-Saksi-Beri-Keterangan-Palsu-di-MK.html>, diakses 11 Mei 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online,  
<http://kbbi.web.id/wenang>, diakses 23 Agustus 2015

\_\_\_\_\_, <http://kbbi.web.id/jaksa.>, diakses 26 Agustus 2015

\_\_\_\_\_, <http://kbbi.web.id/sosiologis>, diakses 14 Januari 2016

\_\_\_\_\_, <http://kbbi.web.id/sosiologi>, diakses 14 Januari 2016

MSH, "Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (1), Rumtag Kepresidenan/Abror Rizki",  
<http://www.nasional.kompas.com/read/2009/11/17/19381368/Inilah.Dokumen.Lengkap.Rekomendasi.Tim.Delapan.1>, diakses 01 Februari 2016

Nov/Rfq, "Suruh Saksi Berbohong di MK, Bambang Widjojanto Tersangka di Mabes Polri",  
<http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/lt54c1cefd572d9/Suruh-Saksi-Berbohong-di-MK-Bambang-Widjojanto-Tersangka-di-Mabes-Polri>, diakses 11 Mei 2016

Novi Christiastuti Adiputri, "Deponering Bibit-Chandra Resmi Ditandatangani",  
<http://www.detiksport.com/read/2011/01/24/202147/1553619/10/deponering-bibit-chandra-resmi-ditandatangani>, diakses 23 Agustus 2015

Nurie Martapura, "Jaksa Agung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto", <https://youtu.be/c6mviolPeFk>, diakses 11 Mei 2016



Oscar Ferri dan Devira Prastiwi, “Sebelum Deponering AS dan BW, Prasetyo Minta Banyak Pertimbangan”,  
<http://www.m.liputan6.com/news/read/2450836/Sebelum-Deponering-AS-dan-BW,Prasetyo-Minta-Banyak-Pertimbangan>, diakses 11 Mei 2016

Panji Apriyanto, “Manusia dan Keadilan”,  
<http://www.panjiapriyanto.blogspot.com/2012/05/manusia-dan-keadilan.html?m=1>, diakses 26 Februari 2016

Rani Virginia Utami, CNN Indonesia, “MK Putuskan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan”,  
<http://www.m.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putuskan-penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan/>, diakses 28 Februari 2016

Silvan Egistian, “Resume Buku Pengantar Ilmu Hukum Karya Dr. Marwan Mas, SH.,MH.”  
<http://egistiansilvan.blogspot.com/2013/07/resume-buku-pengantar-ilmu-hukum-karya.html>. diakses 25 Agustus 2015

Yohanes Paskalis, “Jaksa Agung Resmi Deponering Kasus Samad dan BW”,  
<http://www.m.tempo.co/read/news/2016/03/03/063750398/jaksa-agung-resmi-deponering-kasus-samad-dan-bw>, diakses 10 Mei 2016

#### Artikel Jurnal:

Asnoor, H.M. Thaib Hasby, “Perkara Praperadilan Tidak Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali (Anggodo Widjojo-Bibit Chandra)”, *Jurnal Varia Peradilan*, No.315, Februari 2012

Iskandar, Nandan, “Kejaksaan di Mata Masyarakat”, *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol.III, No.1, Juli 2011

Minarno, Nur Basuki, “Proses Penanganan Perkara dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Acara “Khusus” dalam Tindak Pidana Korupsi)”, *Jurnal Yuridika*, Vol.17, No.4, Juli-Agustus 2002

Syafrudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, April 2000

Yunus, Ahsan, “Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume III, No.2, November 2011



### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir:**

- Karniasari, Arin, 2012, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Rullyandi, Muhammad, 2012, *Pembatasan Kekuasaan Presiden Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa Agung Dalam Upaya Menjamin Independensi Kekuasaan Penuntutan Jaksa Agung Berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara*, Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Wijanarko, Panji, 2012, *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

### **Putusan Pengadilan:**

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel Perihal Praperadilan antara Anggodo Widjojo (Pemohon) Terhadap Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Termohon I) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Termohon II), 19 April 2010
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID/PRAP/2010/PT.DKI Perihal Banding Praperadilan antara Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Pembanding semula Termohon I) melawan Anggodo Widjojo (Terbanding semula Pemohon) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Turut Terbanding semula Termohon II), 03 Juni 2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 152/PK/Pid/2010 Perihal Peninjauan Kembali dalam perkara Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I/Pembanding) melawan Anggodo Widjojo (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon/Terbanding) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon II/Turut Terbanding), tanggal 07 Oktober 2010